

TEOLOGI PEMBEBASAN ALI SYARI'ATI SEBAGAI PERLAWANAN TERHADAP PROYEK STRATEGIS NASIONAL

Fiqi Restu Subekti¹, Albef Fahrozi²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

e-mail: 1figirestu92@gmail.com, 2albeffahrozi73@gmail.com

*Fiqi Restu Subekti

ABSTRACT

Artikel ini mengkaji relevansi pemikiran Ali Syari'ati dalam menolak Proyek Strategis Nasional (PSN) di Indonesia yang kerap berdampak negatif terhadap masyarakat kecil, lingkungan, dan keadilan sosial. Melalui pendekatan kualitatif dan studi kepustakaan, penelitian ini menafsirkan konsep-konsep kunci Syari'ati seperti tauhid, rausyan fikr, dan ummah sebagai landasan ideologis perlawanan terhadap pembangunanisme yang eksploitatif. Syari'ati memandang Islam bukan sekadar sistem teologis, tetapi sebagai ideologi pembebasan yang menuntut keberpihakan pada kaum tertindas (*mustadh'afin*). Dalam konteks PSN, pemikiran Syari'ati membongkar ilusi kemajuan dengan menekankan pentingnya kesadaran kolektif, peran intelektual lokal yang tercerahkan, serta visi masyarakat ideal berbasis nilai-nilai tauhid dan keadilan. Artikel ini menegaskan bahwa penolakan terhadap PSN bukan bentuk anti-kemajuan, melainkan upaya afirmatif menuju tatanan sosial yang lebih adil, berkeadaban, dan berkelanjutan.

Keywords: *Ali Syari'ati, Teologi Pembebasan, Proyek Strategis Nasional, Perlawanan Sosial.*

History Article: 11 Mei 25

Incoming articles: 13 Mei 25

Revised article: 14 Mei 25

Articles accepted: 15 Mei 25

I. INTRODUCTION

Dalam arus sejarah pemikiran Islam kontemporer, nama Ali Syari'ati ditempatkan sebagai salah satu tokoh revolusioner dalam dunia Islam. Ia tidak hanya berbicara tentang Islam sebagai agama yang bersifat ritualistik, tetapi memproyeksikannya sebagai suatu kekuatan historis yang mampu menggerakkan perubahan sosial secara radikal. Bagi Syari'ati, Islam bukan sekadar sistem keimanan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, melainkan sebuah proyek pembebasan yang mengakar dalam kesadaran historis umat. Dalam pandangannya,



manusia bukanlah entitas pasif yang tunduk pada kekuatan takdir semata, tetapi subjek historis yang memikul tanggung jawab eksistensial untuk melawan penindasan dan membebaskan sesamanya. Dengan demikian, Islam tampil sebagai ideologi yang bukan hanya menjawab persoalan metafisis, tetapi juga mengintervensi struktur sosial yang timpang dan menindas.

Gagasan ini memperoleh relevansinya ketika ditempatkan dalam konteks pembangunan di negara-negara berkembang yang sering kali meniru logika modernitas Barat tanpa mempertimbangkan keseimbangan ekologis dan keadilan sosial. Di Indonesia, misalnya, Proyek Strategis Nasional (PSN) kerap diposisikan sebagai simbol kemajuan dan pembangunan nasional. Namun di balik narasi kemajuan tersebut, terdapat dinamika perampasan ruang hidup masyarakat kecil, pergeseran struktur sosial lokal, dan alienasi ekologis yang menimpa komunitas-komunitas tradisional. Pembangunan yang mengatasnamakan nasionalisme sering kali menjelma menjadi bentuk baru kolonialisme internal, di mana negara menjadi instrumen kekuasaan yang memaksakan kehendaknya atas nama efisiensi dan pertumbuhan. Maka dalam proyek Strategis Nasional tersebut perlu dipertanyakan bahwa untuk siapa, oleh siapa, dan atas dasar nilai apa pembangunan ini dilaksanakan.

Ali Syari'ati menawarkan kerangka berpikir yang membongkar ilusi kemajuan semu semacam ini. Ia mengajukan Islam sebagai ideologi yang berpihak secara radikal kepada kaum mustadh'afin (kelompok yang secara struktural dirampas hak-haknya). Bagi Syari'ati, tugas utama seorang intelektual Muslim bukanlah membenarkan status quo kekuasaan, melainkan menjadi pewaris kenabian yang menolak tirani dalam segala bentuknya. Islam, dalam visinya, adalah kekuatan eksistensial yang membangkitkan manusia dari keterasingan sosial dan spiritual, membebaskan mereka dari segala bentuk penindasan, baik yang bersifat material maupun simbolik. Perlawanan bukanlah sekadar tindakan politis, melainkan bentuk dari keterpanggilan eksistensial manusia dalam mengafirmasi keberadaannya yang otentik.

Di sinilah penelitian ini mengambil pijakan untuk menafsirkan kembali pemikiran Ali Syari'ati dalam konteks kontemporer Indonesia, khususnya dalam menghadapi logika kekuasaan pembangunan yang represif. Dengan menggunakan pendekatan filosofis dan kritis, penelitian ini tidak hanya ingin membedah struktur ketimpangan sosial yang dihasilkan oleh proyek-proyek strategis negara, tetapi juga menawarkan Islam sebagai kerangka ideologis yang mampu menghidupkan kembali kesadaran perlawanan. Islam bukan hanya sebagai warisan normatif, tetapi sebagai praksis emansipatoris yang hidup dalam realitas sosial. Dalam dunia yang terus dihegemoni oleh kapitalisme global dan birokrasi negara, pemikiran Syari'ati menjadi seruan moral dan filosofis untuk menata kembali kehidupan bersama berdasarkan keadilan, keberpihakan, dan kesadaran transformatif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (library research). Fokus penelitian ini adalah menafsirkan secara mendalam pemikiran Ali Syari'ati sebagai landasan konseptual dalam menolak Proyek

Strategis Nasional yang dianggap menindas hak-hak masyarakat kecil, merusak lingkungan, dan melanggengkan ketimpangan sosial. Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini melalui karya-karya Ali Syari'ati seperti Humanisme Islam, Ideologi Kaum Intelektual, Ummah dan Imamah, serta Agama versus Agama, dan lain sebagainya. Sementara data sekunder atau pendukungnya diambil dari buku-buku, laporan riset, dan artikel-artikel ilmiah yang membahas Proyek Strategis Nasional, konflik agraria, dan dampaknya terhadap masyarakat lokal serta lingkungan. Analisis dalam penelitian ini dilakukan untuk menginterpretasikan gagasan pemikiran Ali Syari'ati untuk membongkar makna ideologis dan praksis dari konsep tauhid, rausyan fikr, dan ummah. Data yang diperoleh dianalisis secara kritis untuk memahami bagaimana pemikiran Syari'ati dapat digunakan sebagai alat baca dan kritik terhadap PSN dalam konteks Indonesia.

II. RESULTS AND DISCUSSION

Biografi Ali Syari'ati dan Konsep Pemikirannya

Ali Syari'ati lahir pada tanggal 24 November 1933 dengan nama asli Ali Mazinani karena ia dilahirkan di Mazinan, wilayah dekat kota Masyhad yang dianggap suci oleh para penganut Syiah imamiyah Itsna 'Asyariyah, karena di kota tersebut dimakamkannya Ali bin Musa al-Ridha seorang imam kedelapan dalam tradisi Syiah imamiyah Itsna 'Asyariyah. Ayahnya bernama Muhammad Taqi Syari'ati dan ibunya bernama Zahrah. Nama Syari'ati sendiri yang kemudian dikenal sebagai namanya yang pertama kali digunakan pada paspornya guna mengelabui petugas imigrasi, sewaktu ia meninggalkan Iran menuju Inggris, pada tanggal 16 Mei 1977 (Hanafi, 2003).

Kedua orang tuanya merupakan tokoh yang sangat dihormati ditengah-tengah masyarakatnya sebagai tokoh spiritual. Meskipun demikian, keluarga Syari'ati tetaplah hidup sederhana layaknya masyarakat yang lain. Dari keluarganya inilah Ali Syari'ati membentuk kepribadiannya, mentalitas, dan jati dirinya, terutama melalui peran ayah sebagai orang tua sekaligus sebagai guru, dan pembimbing spiritualnya (Supriyadi, 2003: 27-28). Saat masih muda Ali Syari'ati menghabiskan waktunya untuk belajar, membantu orang tuanya mencari nafkah, dan ikut aktif dalam perjuangan-perjuangan politik untuk menentang rezim Syah Pahlevi yang sedang berkuasa di Iran pada saat itu.

Selain terpengaruh oleh ayahnya, pembentukan kepribadian Ali Syari'ati juga ikut dipengaruhi oleh kakeknya yang bernama Akhund Ahmad dan pamannya yang bernama Najib Naysapuri. Dari kakek dan pamannya lah Ali Syari'ati belajar tentang fiqih, sastra, dan filsafat. Ali Syari'ati cukup mewarisi tradisi keilmuan yang diturunkan dari ayahnya, kakeknya, dan pamannya tersebut (Supriyadi, 2003: 30-31). Hal ini bisa disaksikan melalui kehidupannya yang memiliki kecenderungan yang sangat tinggi terhadap berbagai jenis keilmuan serta gerakan sosial keagamaan seperti halnya ayah, kakek, dan pamannya tersebut.

Pendidikan Ali Syari'ati dimulai dari sekolah swasta di Masyhad (Rahmena, 2002). Saat usianya beranjak remaja, Ali Syari'ati cukup tekun melakukan studi terhadap filsafat, tasawuf, sastra, dan problem humanisme (Supriyadi, 2003: 31). Ketika beranjak dewasa, Ali Syari'ati mulai menyibukkan dirinya dalam aktivitas sosial, politik, dan keagamaan di "Gerakan Sosialis Penyembah Tuhan" yang didirikan oleh ayahnya (Supriyadi, 2003: 31). Bahkan di usianya yang masih 17 tahun, Ali Syari'ati tergabung dalam gerakan nasionalisme yang diusung oleh Muhammad Mussaddeq, seorang Perdana Menteri Iran untuk menenggelamkan rezim Syah Pahlevi. Setelah Mussaddeq gagal dalam kudetanya tersebut, kemudian Ali Syari'ati bergabung dengan ayahnya dalam "Gerakan Perlawanan Nasional" yang didirikan oleh Mehdi Bazargan. Akibat gerakannya tersebut, dengan ayahnya dipenjara selama 8 bulan di Teheran (Malakky, 2004: 15). Setelah bebas dari penjara, Ali Syari'ati mendirikan Asosiasi Pelajar di Masyhad dan melakukan gerakan untuk menasionalisasi perusahaan industri minyak Iran (Syari'ati, 1992: 7).

Setelah lulus sebagai sarjana sastra pada tahun 1959 di Universitas Masyhad, setahun kemudian ia memperoleh beasiswa dari pemerintah untuk meneruskan belajarnya di Universitas Sorbone, Prancis (Malakky, 2004: 15). Selama 5 tahun tinggal di Prancis, ia banyak mempelajari berbagai macam keilmuan serta aktif dalam berbagai gerakan pembebasan, seperti "Gerakan Pembebasan Iran" bersama Mustafa Chamran dan Ibrahim Yazdi. Dalam waktu yang bersamaan ia juga terlibat dalam gerakan "Front Nasional Kedua". Tidak hanya itu, ia juga ikut aktif dalam "Gerakan Pembebasan Aljazair" (Supriyadi, 2003: 34). Di Prancis, ia berguru kepada banyak tokoh terkenal yang ada di Prancis, seperti Alexist Carrel, Jean Paul Sartre, Henry Bergson, Frans Fanon, Louis Massignon, Albert Camus, dan yang lainnya (Malakky, 2004: 15). Dari beberapa tokoh Prancis yang memberikan pengaruh terhadap pemikirannya adalah Alexist Carrel. Bahkan Ali Syari'ati sampai menerjemahkan dan mengembangkan buku karya Alexist Carrel yang berjudul "*de Prayer*" ke dalam bahasa Arab dengan judul "*al-Du'a*". Sementara tokoh tokoh eksistensialisme seperti Jean Paul Sartre, Soren Abeye Kierkegard, dan Nikholas Bordayev juga turut memberikan pengaruh terhadap pemikiran Ali Syari'ati. Selain itu Ali Syari'ati juga banyak mengkaji pemikiran-pemikiran Marxisme yang saat itu sedang populer di dunia. Setelah di Prancis selesai menamatkan program doktoralnya, pada bulan September 1964, ia meninggalkan Prancis dan kembali pulang ke negaranya Iran (Supriyadi, 2003: 38).

Setelah sampai di Iran, Ali Syari'ati ditangkap dan ditahan selama 1,5 bulan atas dasar keterlibatannya dalam gerakan politik melawan pemerintah selama ia di Prancis (Malakky, 2004: 15). Setelah dibebaskan, ia kemudian mengajar di Universitas Masyhad dan juga beberapa sekolah yang ada di Masyhad. Ia kemudian dikeluarkan dari Universitas Masyhad sebab aktivitas politiknya dianggap membahayakan. Kemudian bersama Murtadha Muthahhari, Husein Behesyti, dan ulama-ulama Syiah lainnya, ia mendirikan lembaga pendidikan Huseiniyah Irsyad. Selama mengajar di Huseiniyah Irsyad, ia banyak memberikan kuliah yang cukup membakar semangat

anak muda Iran untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah. Akibat kegiatannya ini, akhirnya ia kembali dijebloskan ke dalam penjara selama lima ratus hari oleh pemerintah. Ali Syari'ati baru dibebaskan oleh pemerintah Iran pada bulan Maret 1975, itu pun setelah adanya desakan dari berbagai organisasi Internasional serta para tokoh intelektual Prancis dan Aljazair (Supriyadi, 2003: 40).

Setelah dibebaskan dari penjara, Ali Syari'ati mulai sadar bahwa dirinya tidak bebas lagi untuk melakukan aktivitas politik selama tinggal di Iran. Akhirnya pada tanggal 16 Mei 1977, ia meninggalkan Iran dan pergi menuju ke Eropa. Tujuan utamanya ialah untuk singgah di Inggris dan selanjutnya hendak ke Amerika Serikat untuk mengunjungi anaknya yang kuliah di sana. Namun, belum sempat ia pergi ke Amerika, pada tanggal 19 Juni 1977, ia ditemukan meninggal secara misterius di rumah keluarganya, di Schoumpton, Inggris (Rahmena, 2002: 240). Pemerintah Iran (rezim Syah) menyebutkan bahwa Ali Syari'ati meninggal karena serangan jantung, namun dugaan terkuatnya ia dibunuh oleh SAVAK (agen intelejen Iran) (Malakky, 2004: 25).

Adapun beberapa konsep pemikiran revolusioner Ali Syari'ati yakni seperti tauhid sebagai landasan teologis, *rausyan fikr*, dan *ummah* sebagai tujuan perubahan. *Pertama*, tauhid sebagai landasan teologis, maksudnya yaitu tauhid tidak hanya terbatas pada keyakinan monoteisme, tetapi merupakan dimensi yang mencakup keseluruhan eksistensi yang menyatukan Tuhan, manusia, dan alam semesta (Febrian, 2022). Artinya tidak ada pemisahan yang ketat antara realitas ilahiyah yang transenden dan realitas alam dan manusia yang imanen. Tauhid berfungsi sebagai ideologi pembebasan yang menentang segala bentuk diskriminasi sosial, ketidakadilan, dan penindasan, yang dianggap sebagai bentuk syirik atau lawan dari tauhid. Dengan demikian, tauhid menjadi fondasi untuk membangun masyarakat yang egaliter dan adil (Ummah, 2020).

Kedua, rausyan fikr. Istilah rausyan fikr berasal dari bahasa Persia yang berarti pemikir yang tercerahkan (Syari'ati, 1993). Konsep *rausyan fikr* yang digagas oleh Ali Syari'ati merujuk pada individu yang tercerahkan dan memiliki kesadaran kemanusiaan serta tanggung jawab sosial untuk melakukan perubahan (Maliki, 2018). *Rausyan fikr* adalah orang yang melakukan perjuangan tertentu dan sering kali berasal dari kalangan intelektual yang membuat mereka lebih berpengaruh dalam masyarakat (Syari'ati, 1998: 27-28). Syari'ati menekankan bahwa *rausyan fikr* harus memiliki pemahaman mendalam tentang nilai-nilai spiritual dan humanisme Islam. Mereka harus mampu mengintegrasikan pengetahuan tradisional dengan pemikiran modern untuk menciptakan solusi yang relevan dengan tantangan kontemporer. Dalam pandangan Syari'ati, *rausyan fikr* berperan penting dalam membangkitkan kesadaran masyarakat terhadap penindasan dan mendorong mereka untuk berjuang demi keadilan dan kebebasan (Negara & Muhlas, 2023).

Syari'ati memperkenalkan *rausyan fikr* sebagai individu yang tidak hanya sadar akan realitas, tetapi juga berperan sebagai agen perubahan. Mereka adalah katalis yang membangkitkan massa yang tertidur untuk melakukan revolusi melawan

penindas. *Rausyan fikiran* berfungsi sebagai pemandu dan pelopor yang berani mengambil risiko dalam memperjuangkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Mereka memainkan peran aktif dalam memobilisasi massa, membangkitkan kesadaran kolektif, dan memimpin perjuangan menuju masyarakat yang lebih adil dan bermartabat (Asrori & Huda, 2024). Mereka adalah individu yang sadar akan keadaan manusia pada masanya dan membawa ideologi Islam progresif untuk membimbing dan menggerakkan masyarakat menuju tatanan sosial ideal yang disebut “*ummah*” (Riyanto, 2021).

Ketiga, konsep *ummah*. Frasa *ummah* berasal dari kata “*amma*”, yang berarti keyakinan atau niat keras dengan maksud tertentu (Syari’ati, 1989). Oleh karena itu, sejumlah individu yang memiliki keyakinan yang sama dan secara harmonis berusaha mencapai tujuan bersama disebut *ummah* (Ummah, 2020). Konsep *ummah* menurut Ali Syari’ati adalah gagasan tentang masyarakat ideal yang memiliki ciri-ciri kebersamaan dalam arah dan tujuan tertentu, serta membentuk kekerabatan baik lahir maupun batin. Konsep ini menekankan pentingnya kebersamaan dan kolektivitas dalam mencapai tujuan bersama. *Ummah* menurut Syari’ati merupakan tujuan akhir dari perubahan sosial yang ia gagas. Sistem *ummah* ini digambarkan sebagai sistem sosial yang ideal, di mana tidak ada perbedaan berdasarkan golongan, ras, kasta, agama, dan sebagainya. Sistem ini juga bebas dari segala bentuk ketidakadilan dan diskriminasi sosial.

Syari’ati melihat *ummah* sebagai manifestasi dari masyarakat tanpa kelas, yang merupakan salah satu elemen penting dalam kerangka pemikirannya tentang perubahan sosial. Dalam konteks ini, *ummah* berfungsi sebagai tujuan dari perubahan sosial yang didorong oleh peran intelektual tercerahkan atau *rausyan fikiran* yang bertugas membangun kesadaran dan menjembatani kepentingan kelas sosial yang tertindas (Riyanto, 2021). Kepemimpinan dalam *ummah* harus bersih, revolusioner, dan memiliki komitmen pada perkembangan masyarakat, yang didasarkan pada perjuangan dalam teologi untuk melaksanakan kehendak Tuhan (Ramadhan, 2011). Dengan demikian, konsep *ummah* dalam pemikiran Ali Syari’ati tidak hanya bersifat teoretis tetapi juga praktis, karena ia mengaitkannya dengan upaya untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan egaliter, bebas dari penindasan dan diskriminasi.

Proyek Strategis Nasional dan Alasan Penolakannya

Proyek Strategis Nasional merupakan serangkaian proyek pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai program prioritas nasional dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Landasan hukum pelaksanaan PSN diatur dalam berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan

Umum, serta Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 yang telah beberapa kali diperbarui, terakhir melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020.

Penetapan suatu proyek sebagai Proyek Strategis Nasional dilakukan berdasarkan sejumlah kriteria strategis, antara lain besarnya nilai investasi, dampak luas terhadap perekonomian nasional maupun daerah, keterkaitan dengan program prioritas pemerintah, serta kemampuannya dalam meningkatkan konektivitas wilayah, ketahanan energi dan pangan, serta penyediaan infrastruktur dasar. Dalam konteks ini, Proyek Strategis Nasional tidak hanya diposisikan sebagai instrumen pembangunan fisik, tetapi juga sebagai strategi pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang.

Proyek Strategis Nasional mencakup berbagai sektor pembangunan, mulai dari infrastruktur transportasi (jalan tol, pelabuhan, bandara, dan kereta api), energi (pembangkit listrik dan jaringan transmisi), pangan (irigasi dan bendungan), hingga kawasan industri, teknologi informasi, dan sumber daya air. Keberagaman sektor ini menunjukkan bahwa Proyek Strategis Nasional dirancang secara multisektor untuk menjawab tantangan pembangunan yang kompleks dan lintas bidang. Dari sisi implementasi, proyek-proyek strategis nasional mendapatkan berbagai bentuk fasilitas dan kemudahan dari pemerintah, seperti percepatan perizinan, dukungan pengadaan tanah, kemudahan pembiayaan, serta koordinasi lintas lembaga. Upaya percepatan tersebut diawasi dan dikawal oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), yang berperan dalam memonitor, mengevaluasi, serta mengatasi hambatan pelaksanaan di lapangan.

Dalam kerangka pembangunan nasional, Proyek Strategis Nasional merepresentasikan paradigma pembangunan yang bersifat top-down tetapi tetap mempertimbangkan kebutuhan daerah. Oleh karena itu, keberhasilan Proyek Strategis Nasional tidak hanya diukur dari capaian fisik dan nilai investasi semata, melainkan juga dari kontribusinya terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, pengurangan kesenjangan wilayah, dan penguatan daya saing nasional. Dengan demikian, Proyek Strategis Nasional merupakan pilar penting dalam strategi pembangunan Indonesia, yang mengedepankan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta, demi mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan merata di seluruh pelosok negeri.

Meskipun Proyek Strategis Nasional digadang-gadang sebagai instrumen percepatan pembangunan dan pemerataan ekonomi, berbagai kajian dan temuan lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan Proyek Strategis Nasional kerap menimbulkan persoalan serius, terutama bagi masyarakat di sekitar wilayah proyek. Alih-alih membawa kesejahteraan, pelaksanaan Proyek Strategis Nasional justru kerap merugikan masyarakat. Berikut ini adalah beberapa alasan terbesar penolakan masyarakat terhadap Proyek Strategis Nasional:

Perampasan Tanah Adat

Dalam kerangka pembangunan nasional, Proyek Strategis Nasional (PSN) dirancang sebagai upaya akselerasi pembangunan infrastruktur demi meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, di balik semangat pembangunan tersebut, muncul persoalan serius terkait perampasan tanah adat yang secara sistematis terjadi di berbagai wilayah Nusantara. Tanah-tanah yang telah secara turun-temurun dikuasai dan dikelola oleh masyarakat adat kerap kali tidak diakui secara hukum formal karena belum memiliki sertifikasi atau pengakuan dari negara, sehingga menjadi rentan terhadap klaim negara dan swasta. Adapun modus-modus perampasan tanah yang marak sekali terjadi di lapangan khususnya dalam lingkup Proyek Strategis Nasional seperti alasan pembangunan untuk kepentingan masyarakat rayuan ganti rugi yang tinggi, dijadikan tenaga kerja, pemalsuan data lapangan, menggunakan institusi keagamaan sebagai legitimasi perampasan tanah, pemberitahuan pengadaan tanah secara tertutup, melibatkan aparat bersenjata untuk mengintimidasi, masyarakat dipaksa mengambil uang konsinyasi (Septian, 2023).

Beberapa kasus Proyek Strategis Nasional yang merampas tanah adat seperti pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang merampas hak-hak ulayat yang dimiliki oleh masyarakat adat. Pengakuan terhadap hak ulayat ini diatur dalam Pasal 3 UU Pokok Agraria, yang menyatakan bahwa hak ulayat dan hak-hak serupa dari masyarakat adat diakui selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional (Arisaputra, 2021). Namun, pada praktiknya, asas ini seringkali sulit diterapkan karena adanya konflik antara kebutuhan lahan untuk pembangunan IKN dan hak masyarakat adat untuk mempertahankan tanah yang diwariskan turun-temurun. Kepentingan pembangunan IKN cenderung diprioritaskan, dan akibatnya, kepentingan masyarakat adat yang bergantung pada tanah ulayat sering terabaikan dengan dirampas hak-haknya (Fatharani dkk, 2024).

Proyek food estate juga tidak lepas dalam perampasan tanah milik masyarakat adat. Di Kabupaten Gunung Mas, penduduk lokal desa-desa yang terletak di sekitaran perkebunan singkong, mayoritasnya adalah etnis adat Dayak. Area tersebut dulunya menjadi tempat mereka berburu rusa dan babi liar, mengumpulkan rotan dan terlibat dalam wanatani dengan pangan tumbuhan bawah. Kini, mereka mengeluhkan bahwa tanaman wanatani mereka sendiri telah dirusak oleh operasi pembukaan lahan, tanpa di berikan kompensasi (Anshari & Permata, 2024).

Adapun kasus lainnya terkait perampasan lahan seperti terjadi di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo. Masyarakat Wadas menolak pertambangan batuan andesit untuk suplai material batuan Bendungan Bener. Hal tersebut justru dipaksa oleh negara dengan dalih Proyek Strategis Nasional yang menurut pandangan pemerintah akan melahirkan kesejahteraan masyarakat (Andhika, 2022). Berdasarkan kasus tersebut sama halnya juga terjadi dengan kasus perampasan Tanah Rempang Batam, dimana pemerintah bertindak sewenang-wenang dalam hak tanah milik Masyarakat Hukum Adat (MHA) setempat tanpa persetujuan kedua belah pihak, sehingga tidak

menimbulkan kesejahteraan masyarakat dan menimbulkan adanya ketidakpastian hukum (Rahayu, 2024). Dan tentunya masih banyak lagi kasus-kasus yang lain di Indonesia mengenai perampasan lahan atau tanah adat akibat dari Proyek Strategis Nasional.

Kerugian Secara Ekonomi

Proyek Strategis Nasional gagal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan yang inklusif. Salah satu dampak utama Proyek Strategis Nasional adalah konflik agraria yang melibatkan penggusuran lahan masyarakat tanpa kompensasi yang memadai. Sepanjang 2020-2023, tercatat 134 konflik agraria akibat PSN, melibatkan area seluas 571.156 hektar dan berdampak pada 110.066 keluarga. Kehilangan lahan ini merampas sumber penghidupan masyarakat, terutama petani dan nelayan, sehingga mereka kehilangan pendapatan utama mereka. Daerah-daerah dengan proyek hilirisasi nikel, angka kemiskinan rata-rata justru lebih tinggi dibandingkan angka kemiskinan nasional. Data BPS juga mengungkapkan, Proyek Strategis Nasional hanya berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,9%, jauh dari target pemerintah 7% periode 2015-2023. Kondisi ini menunjukkan, ketidaksesuaian antara harapan dan implementasi Proyek Strategis Nasional.

Proyek infrastruktur besar juga turut memicu kenaikan biaya hidup di sekitar lokasi proyek. Misalnya, harga tanah dan properti meningkat tajam akibat spekulasi pasar, sehingga masyarakat berpenghasilan rendah kesulitan untuk membeli atau menyewa tempat tinggal baru setelah tergusur. Beberapa proyek PSN dilaporkan merusak infrastruktur publik yang sudah ada, seperti jalan desa atau irigasi pertanian. Kerusakan ini menghambat aktivitas ekonomi masyarakat sehari-hari, seperti distribusi hasil panen atau akses ke pasar lokal. Akibatnya, pendapatan masyarakat menurun sementara biaya perbaikan infrastruktur tidak selalu ditanggung oleh pemerintah atau pengembang proyek. Meskipun Proyek Strategis Nasional bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, dampaknya terhadap masyarakat sering kali kontraproduktif. Kerugian ekonomi berupa kehilangan sumber penghidupan, penurunan produktivitas lokal, kenaikan biaya hidup, kerusakan infrastruktur publik, dan ketimpangan ekonomi menjadi alasan serius terhadap penolakan Proyek Strategis Nasional.

Kerusakan Lingkungan

Tidak hanya dampak sosial seperti perampasan tanah adat dan kerugian secara ekonomi, kerusakan lingkungan juga menjadi dampak yang sangat signifikan dari Proyek Strategis Nasional. Beberapa kasus Proyek Strategis Nasional yang menyebabkan kerusakan lingkungan seperti pembangunan industri nikel yang mendegradasi lingkungan dengan terjadinya deforestasi besar-besaran akibat aktivitas penambangan (Pabpu, 2024). Selain itu, limbah industri yang dihasilkan dalam proses pengolahan nikel sering kali mengandung berbagai polutan berbahaya, seperti logam berat. Penurunan kualitas air ini tidak hanya berdampak pada kesehatan

manusia, tetapi juga pada spesies akuatik yang bergantung pada kebersihan air untuk kelangsungan hidupnya. Dampaknya limbah yang mengalir ke sungai dan laut, meracuni rantai makanan yang pada akhirnya berujung pada konsumsi oleh manusia (Ahyadi, 2021).

Kerusakan lingkungan akibat Proyek Strategis Nasional juga turut disumbangkan dalam program food estate. Dalam program food estate yang dilakukan di lahan gambut tidak melakukan pembukaan lahan baru. Hal ini menyebabkan mikroorganisme lahan gambut menghilang dan mudah turun. Akibatnya ketika musim hujan tiba, hujan turun ditengah-tengah kondisi lahan gambut olahan, lahan tersebut tidak dapat menampung air hujan dengan baik. Sementara saat musim kemarau, lahan terdegradasi menjadi kering dan mudah terbakar (Baringbing, 2021). Hal ini karena lemahnya Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dari proyek yang dilakukan di tanah gambut. Kebakaran bukan satu-satunya masalah yang ditimbulkan oleh program food estate yang dilakukan di atas tanah gambut. Kanal-kanal yang dibangun guna mengendalikan air sungai di lokasi tanah gambut menyebabkan polusi udara yang dirasakan hingga Malaysia dan Singapura (Oknawati, 2022). Dan tentunya masih banyak lagi kasus-kasus kerusakan lingkungan akibat Proyek Strategis Nasional.

Relevansi Pemikiran Ali Syari'ati dalam Konteks Menolak Proyek Strategis Nasional *Kesadaran Kolektif*

Konsep tauhid dalam pemikiran Ali Syari'ati tidak berhenti pada pengakuan metafisis tentang keesaan Tuhan, tetapi menjelma menjadi prinsip ontologis dan praksis yang membebaskan manusia dari segala bentuk penindasan struktural. Tauhid, bagi Syari'ati, bukan hanya pemahaman teologis, tetapi juga sebuah ideologi yang menuntut pembebasan total dari sistem yang mengabdikan kepada kekuatan duniawi selain Tuhan, seperti kapitalisme, otoritarianisme, dan pembangunanisme semu. Dalam konteks Proyek Strategis Nasional, tauhid menjadi alat analisis yang membongkar mitos pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi menindas manusia dan merusak lingkungan. Ketika negara menjadikan manusia sebagai alat produksi demi proyek-proyek infrastruktur raksasa, maka ia telah menggantikan posisi Tuhan dengan "berhala baru" berupa modal, kekuasaan, dan efisiensi. Dalam kacamata tauhid, ini adalah bentuk modern dari syirik sosial.

Kesadaran kolektif yang dibangun di atas fondasi tauhid harus mampu menyadarkan umat bahwa ketundukan kepada sistem pembangunan yang menindas adalah bentuk pengkhianatan terhadap misi spiritual Islam itu sendiri. Islam, menurut Syari'ati, hadir sebagai kekuatan historis yang menggerakkan pembebasan umat dari struktur kekuasaan zalim, bukan sebagai alat legitimasi kekuasaan negara. Tauhid menegaskan bahwa manusia adalah khalifah di bumi, bukan objek dari kebijakan elite teknokratik. Maka, segala bentuk pembangunan yang merampas ruang hidup masyarakat, menggusur tanah adat, dan meminggirkan hak-hak ekologis masyarakat

lokal merupakan penistaan terhadap mandat kekhalifahan. Tauhid menjadi prinsip pembebasan yang menolak pengasingan manusia dari alam, sejarah, dan Tuhannya.

Kesadaran kolektif berlandaskan tauhid harus melampaui kesadaran legal-formal. Ia harus mampu menghidupkan ingatan kolektif masyarakat akan nilai-nilai kearifan lokal, relasi harmonis dengan alam, dan martabat sebagai subjek sejarah. Dalam konteks ini, tauhid tidak hanya membebaskan dari dosa pribadi, tetapi juga dari dosa struktural yang menjelma dalam bentuk kebijakan pembangunan yang eksploitatif. Oleh karena itu, penolakan terhadap PSN tidak boleh dipahami semata sebagai perlawanan terhadap proyek fisik, tetapi sebagai afirmasi terhadap eksistensi manusia sebagai makhluk merdeka yang beriman dan bermartabat. Kesadaran kolektif ini harus menjadi basis gerakan sosial yang menyatukan spiritualitas, etika, dan keberanian untuk menolak hegemoni pembangunanisme yang menindas.

Syari'ati secara filosofis menyatukan tauhid dan sejarah, menyatakan bahwa sejarah manusia adalah sejarah perjuangan antara tauhid dan syirik, antara keadilan dan tirani, antara pembebasan dan penindasan. PSN, dalam perspektif ini, bisa saja menjadi instrumen syirik sosial jika menempatkan keuntungan dan kekuasaan di atas kehidupan dan kemanusiaan. Maka pembentukan kesadaran kolektif yang kritis harus dimulai dengan tafsir ulang terhadap tauhid sebagai landasan ideologis perlawanan. Tauhid tidak bisa dikurung dalam ranah ibadah individual, tetapi harus dimaknai sebagai panggilan untuk menegakkan tatanan sosial yang adil, merdeka, dan berorientasi pada keseimbangan semesta.

Melalui kesadaran ini, masyarakat yang sebelumnya diam dan pasrah akan mulai mempertanyakan: mengapa kami dikorbankan? Untuk siapa pembangunan ini? Dengan cara siapa dan atas dasar nilai siapa? Pertanyaan-pertanyaan ini adalah cermin dari tauhid yang hidup dan berpihak. Kesadaran tauhidik inilah yang menjadi batu pijakan awal untuk membangun perlawanan kolektif, bukan dalam semangat destruktif, melainkan konstruktif: menolak demi membela kehidupan, demi mempertahankan martabat, dan demi memperjuangkan tatanan sosial yang lebih berkeadilan dan berketuhanan.

Peran Intelektual Lokal

Dalam pemikiran Syari'ati, intelektual bukanlah teknokrat netral, melainkan sosok yang menyandang misi kenabian. Konsep *rausyan fikr* (intelektual tercerahkan menjadi sentral dalam transformasi sosial). Mereka tidak berdiri di luar realitas, melainkan menyatu dengan derita umat. Dalam konteks PSN, *rausyan fikr* berperan sebagai penggugat wacana pembangunan yang menindas dan sekaligus perumus strategi pembebasan. *Rausyan fikr* memiliki ciri khas: kesadaran eksistensial, keberpihakan pada kaum tertindas, dan keberanian untuk melawan arus. Mereka tidak mencari popularitas, tetapi kebenaran. Dalam menghadapi proyek pembangunan eksploitatif, *rausyan fikr* menjadi suara yang menerjemahkan penderitaan rakyat menjadi narasi politik, teologis, dan etis yang mampu menggugah kesadaran publik.



Peran intelektual lokal sangat penting karena mereka hidup di tengah masyarakat yang terdampak langsung. Mereka mengerti bahasa komunitas, adat, spiritualitas lokal, dan ketegangan sosial yang tak terlihat dalam angka statistik pemerintah. Mereka adalah mata, telinga, dan hati dari realitas yang dibungkam oleh jargon pembangunan. Syari'ati menyadari bahwa perubahan tidak lahir dari elite kekuasaan, tetapi dari bawah—digerakkan oleh mereka yang tercerahkan dan berani. Maka *rausyan fikr* menjadi katalis antara ide dan aksi, antara kesadaran dan gerakan, antara wacana dan massa. Mereka adalah jembatan antara dunia gagasan dan dunia konkret.

Dalam konteks Proyek Strategis Nasional, *rausyan fikr* harus melakukan dekonstruksi terhadap narasi hegemonik negara. Mereka harus mempertanyakan asumsi-asumsi dasar proyek: apakah pembangunan harus selalu berarti pengusuran? Apakah kemajuan harus dibayar dengan penderitaan? Apakah rakyat hanya dilibatkan sebagai objek statistik?. *Rausyan fikr* bukan hanya pengkritik, tetapi juga penggerak. Mereka membangun forum diskusi, menyusun data tandingan, mengorganisir kampanye kesadaran, dan membentuk jaringan perlawanan. Dalam tradisi Islam, mereka mewarisi tugas para nabi: menyampaikan yang benar, meskipun pahit, dan tetap teguh di jalan keadilan. Ali Syari'ati sendiri adalah prototipe *rausyan fikr*. Ia hidup dalam tekanan rezim Syah, tetapi tidak pernah berhenti menulis, berbicara, dan menginspirasi. Dalam semangat yang sama, intelektual lokal hari ini harus menjadikan kampus, masjid, pesantren, balai adat, dan komunitas warga sebagai ruang pembebasan, bukan kooptasi. Dengan demikian, penolakan terhadap PSN bukan semata urusan massa, tetapi juga soal keberanian intelektual untuk berdiri bersama rakyat.

Dalam setiap proyek pembangunan yang menindas, tugas *rausyan fikr* adalah berdiri di sisi rakyat, bukan di balik meja birokrasi. Akhirnya, perlawanan yang didampingi oleh *rausyan fikr* bukanlah perlawanan buta. Ia adalah perlawanan yang tercerahkan, yang tahu ke mana arah perubahan dibawa, atas dasar nilai apa, dan untuk siapa. Di situlah makna profetik seorang intelektual menemukan realisasinya.

Adanya Visi Menuju Tatanan Sosial yang Ideal

Bagi Ali Syari'ati, *ummah* bukan sekadar komunitas keagamaan yang ritualistik, tetapi adalah proyek historis-politik yang berakar pada prinsip kesetaraan, keadilan, dan solidaritas. *Ummah* adalah masyarakat ideal yang menjungkirbalikkan hierarki kekuasaan duniawi dan menggantinya dengan struktur yang berpijak pada nilai tauhid. Dalam konteks PSN, yang kerap menciptakan ketimpangan sosial, dislokasi ekologis, dan konflik horizontal, gagasan *ummah* menjadi kritik sekaligus arah alternatif. *Ummah* tidak mengenal kelas sosial eksploitatif. Dalam *ummah*, tanah bukan komoditas, tetapi amanah. Kekuasaan bukan dominasi, tetapi tanggung jawab. Pembangunan bukan eksploitasi, tetapi penyempurnaan insaniyah.

Tatanan sosial *ummatik* adalah koreksi terhadap logika pembangunan neoliberal yang mengabdikan pada profit dan efisiensi. Dalam logika *ummah*,

pembangunan harus dimulai dari kebutuhan rakyat, bukan dari kepentingan elite. Harus dibangun dalam musyawarah, bukan paksaan. Harus memperkuat komunitas, bukan memecah belah. Syari'ati memandang *ummah* sebagai bentuk praksis dari tauhid sosial. Ketika masyarakat hidup dalam semangat kesetaraan, kerja kolektif, dan kepemimpinan etis, maka *ummah* menjadi kenyataan sejarah, bukan hanya cita-cita utopis. PSN, jika tidak selaras dengan prinsip ini, adalah bentuk kontradiksi terhadap cita-cita Islam.

Dalam sistem ummatik, keberlanjutan ekologis adalah syarat mutlak. Alam tidak bisa dieksploitasi tanpa batas. Hubungan manusia dengan alam harus harmonis dan sakral. Maka proyek-proyek pembangunan yang merusak lingkungan secara struktural adalah bentuk anti-*ummah* dan anti-tauhid. Ummah juga menekankan pentingnya distribusi keadilan. Ketika PSN hanya memperkaya investor besar dan meninggalkan rakyat dalam kemiskinan baru, maka yang terjadi bukanlah pembangunan, tetapi ketimpangan yang dilembagakan. Dalam *ummah*, sumber daya adalah milik bersama, dikelola dengan asas kemaslahatan dan akuntabilitas etis.

Dengan konsep *ummah*, Syari'ati mengajukan Islam bukan hanya sebagai agama, tetapi sebagai alternatif sistem sosial. Ini berarti bahwa dalam menghadapi PSN, umat Islam harus berani menyuarakan pembangunan yang selaras dengan nilai profetik, bukan yang tunduk pada logika kapital. Masyarakat ummatik tidak dibentuk oleh kekerasan struktural, tetapi oleh kesadaran etis kolektif. Dalam masyarakat seperti ini, proyek pembangunan pun akan menjadi sarana kebaikan bersama, bukan instrumen dominasi. Maka tugas hari ini bukan hanya menolak PSN, tetapi membayangkan dan membangun ulang masyarakat berdasarkan prinsip ummah: kesetaraan, partisipasi, spiritualitas, dan keberlanjutan. Inilah tugas generasi Islam progresif, seperti yang dicita-citakan Syari'ati.

III. CONCLUSION

Pemikiran Ali Syari'ati menunjukkan bahwa Islam bukan sekadar agama ritualistik, melainkan ideologi pembebasan yang berpihak pada kaum tertindas dan menjadi alat perjuangan melawan ketidakadilan sosial. Dalam konteks kontemporer Indonesia, pemikiran ini sangat relevan untuk mengkritisi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang sering kali membawa dampak negatif berupa perampasan tanah adat, kerugian ekonomi bagi masyarakat lokal, dan kerusakan lingkungan yang parah. Melalui konsep tauhid sebagai fondasi kesadaran kolektif, *rausyan fikr* sebagai peran intelektual tercerahkan, dan *ummah* sebagai cita-cita tatanan sosial ideal, Syari'ati menawarkan paradigma tanding terhadap pembangunanisme yang eksploitatif. Dengan demikian, penolakan terhadap PSN bukanlah bentuk anti-kemajuan, melainkan upaya afirmatif untuk menegakkan keadilan, spiritualitas, dan keberlanjutan hidup bersama. Islam dalam pandangan Syari'ati adalah kekuatan historis dan praksis yang mendorong pembebasan manusia dari struktur penindasan, serta menjadi fondasi moral bagi perjuangan sosial yang lebih adil dan manusiawi.



IV. REFERENCE

- Ahyadi, M. Y. (2021). "Analisis Dampak Oil Spill Di Teluk Balikpapan Terhadap Kehidupan Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Dan Lingkungan". *Jurnal Bumi Lestari*, 21.
- Anshari, M., & Permata, C. (2024). "Deforestasi Hutan Lindung dalam Proyek Strategis Nasional Food Estate: Perspektif Maqashid Syariah". *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 18(3), 2031-2047.
- Arisaputra, M. I. (2021). *Reforma agraria di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asrori, A., & Huda, M. (2024). "Rausyan Fikr: The Ideal Human Model In Ali Shari'ati's Perspective". *Ad Daqqoq: Indonesian Journal of Religion and Religious Society*, 1(1), 56-70.
- Baringbing, M. S. (2021). "Problematisasi Lingkungan Terhadap Regulasi Food Estate Sebagai Program Strategis Nasional di Desa Gunung Mas & Pulang Pisau Kalimantan Tengah: Environmental Problems with Food Estate Regulations as a National Strategic Program in Gunung Mas & Pulang Pisau Villages, Central Kalimantan". *In Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*. (Vol. 7, No. 1, pp. 353-366).
- Dien Wahid, dkk. (2002). *Ali Syari'ati: Biografi Politik Intelektual Revolusioner*. Jakarta: Erlangga.
- Fajar Muhammad Andhika, "Perampasan Tanah Rakyat Melalui Peraturan Hukum yang Timpang". <https://www.hukumonline.com/berita/a/perampasan-tanah-rakyat-melalui-peraturan-hukum-yang-timpang-it6257861f6e0fd> / diakses 13 April 2025.
- Fatharani, C. A., Rifaldo, T., Yasar, N. F. S., Nuraaqilah, N. T., & Pertiwi, S. P. (2024). "Konflik Perampasan Tanah Masyarakat Di Kawasan Ibu Kota Nusantara". *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(6), 277-286.
- Febrian, R., Khozin, K., & Yusuf, Z. (2022). "Relevansi konsep Humanisme Islam Ali Syari'ati dengan problematika Pendidikan Islam di Indonesia". *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(1), 35-51.
- Hanafi, H. (2003). *Min al-Aqidah ila al-Tsawrah*, terj. Asep Usman Ismail, Suadi Putro, dan Abdul Rauf dengan Judul *Dari Akidah ke Revolusi*. Jakarta: Paramadina.
- Malakky, E. (2003). *Ali Syari'ati: Filosof Etika dan Arsitek Iran Modern*. Bandung: Teraju.
- Maliki, N. (2018). "PENDIDIKAN HUMANISTIK ALA ALI SYARI'ATI". *Al-Tarbawi Al-Haditsah: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1).
- Negara, M. A. P., & Muhlas, M. (2023). "Prinsip-Prinsip Humanisme Menurut Ali Syari'ati". *Jurnal Riset Agama*, 3(2), 357-371.
- Oknawati, A. (2022). "Analisis Konflik: Program Food Estate dalam Proyek Strategi Nasional (PSN) Sebagai Strategi Ketahanan Pangan Nasional".

- Pabbu, A., & Habibi, A. (2024). "PROYEK STRATEGIS NASIONAL VS PENGUSURAN LINGKUNGAN NATIONAL STRATEGIC PROJECTS VS ENVIRONMENTAL DESTRUCTION". *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin*, 8(12).
- Rahayu, R., Rahmawati, S., Hanan, Z. A., Rangkuti, F. M., & Rahmawati, N. (2024). "REFORMULASI RPP PENERBITAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN LAHAN REMPAH GUNA MEWUJUDKAN PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA". *ADIL Indonesia Journal*, 5(2), 93-105.
- Rahmena, A. (2002). *An Islamic Utopian: a Political Biography of Ali Syari'ati*. , terj. Dien Wahid, dkk dengan Judul *Ali Syari'ati: Biografi Politik Intelektual Revolusioner*. Jakarta: Erlangga.
- Ramadhan, M. (2011). "Teologi Kemanusiaan Studi atas Pemikiran Ali Syari'ati". *Jurnal Theologia*, 22(2).
- Riyanto, P. I. (2021). "Agama dan Perubahan Sosial Perspektif Ali Syari'ati". *JAWI*, 4(2), 83-104.
- Septian, R. (2023). "Masalah Pengadaan Tanah Untuk Proyek Strategis Nasional (PSN)". In *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*. (Vol. 1, No. 3, pp. 117-122).
- Shebubakar, A. N., & Raniah, M. R. (2023). "Hukum Tanah Adat/Ulayat". *Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum dan Kesejahteraan*, 4(1), 14-22).
- Supriyadi, E. (2003). *Sosialisme Islam: Pemikiran Ali Syari'ati*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syari'ati, A. (1983). *Kritik Islam Atas Marxisme dan Sesat Pikir Barat Lainnya*, terj. Husni Anis Al-Habsyi. Bandung: Mizan.
- Syari'ati, A. (1989). *Ummah dan Imamah: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Syari'ati, A. (1992). *A Glance at Tomorrow History*, terj. Satria Panindito dengan Judul *Islam Agama Protes*. Jakarta: Pustaka Hidayah.
- Syari'ati, A. (1993). *Ideologi Kaum Intelektual*. Bandung: Mizan.
- Syari'ati, A. (1994). *Agama Versus Agama*, terj. Afif Muhammad dan Abdul Syukur. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Syari'ati, A. (1996). *Humanisme Antara Islam dan Mazhab Barat*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Syari'ati, A. (1998). *Membangun Masa Depan Islam*. Bandung: Mizan.
- Syari'ati, A. (2001). *Abu Dzar*, terj. Tim Muthahhari Paperbacks dengan Judul *Abu Dzar: Suara Parau Menentang Penindasan*. Bandung: Muthahhari Paperbacks.
- Syari'ati, A. (2013). *On The Sociology of Islam*, terj. Arif Mulyadi. Yogyakarta: Rausyan Fikr Institute.
- Ummah, S. S. (2020). "Teologi Pembebasan Ali Syari'ati (Kajian Humanisme dalam Islam)". *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah*, 2(2). 52-75.

